BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian warga negara yang harus dilindungi, karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang dan akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Dalam Pasal 28 (B) ayat (2) Undangundang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam perlindungan anak sangat diwajibkan, sebagaimana setiap anak Adam dipandang suci dan mulia. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isra' ayat 70:

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (al-Isra': 70).

Oleh karena itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas

¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka agung Harapan, 2006), 394.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki orang dewasa.

Kenakalan remaja merupakan perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, yakni gejala sakit (patalogi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³ Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi beruapa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Sebagaimana kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekarang, setiap warga negara di dunia tidak terlepas dari tindakan kriminal, khususnya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa dan yang hebohnya lagi kejahatan itu dilakukan oleh

² Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*), (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2013), 236.

³ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, (Rajawali Pers: Jakarta, 1992), 7.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), 54.

anak yang masih berusia di bawah umur, seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, pencabulan, dan lain-lainnya.

Dalam hal pemidanaan anak, ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.⁵

Dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁷

Lain halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang umurnya belum berusia 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan

⁵ Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 26.

⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

supaya terdakwa anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya/pemeliharanya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.⁸

Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak dengan inisal "SY" masih berusia 17 Tahun, yang terjadi di daerah Bale Bandung kabupaten Bandung. Dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan karena telah melanggar pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-4, yaitu pencurian kendaraan bermotor pada malam hari di pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.

Istilah pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan, menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb yang dikaji dalam skripsi adalah pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dikenakan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yakni pencurian pada malam hari di pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama.

Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan caracara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan

⁸ Lihat Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian hukumnya adalah *hād*, perbuatan pidana tertentu, jenis, dan bentuk hukumannya telah ditentukan dan ditetapkanoleh syara' dan tidak dapat ditambah atau dikurangi, serta telah memenuhi syarat-syaratnya. Sanksi lainya adalah *ta'zīr* yang berlaku bagi pencurian yang tidak memenuhi atau kurang persyaratannya.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandiriannya yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa dan di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.¹⁰

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak

⁹ Sayyid sabiq, Fikih Sunah 9, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), 213.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 11

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak sekaligus memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disingkat UU SPPA. Dalam substansinya memuat semangat mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan dan menghindarkan anak dari proses peradilan dengan cara diversi yang melalui pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata, tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada. Sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai, salah satu bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog di kalangan masyarakat Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restorative

¹¹ Ibid..1.

justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.¹²

Perdamaian dengan melakukan musyawarah untuk mufakat sebagai salah satu cara untuk menjaga hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang patut dijaga dan dirawat, agar keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembang mereka tetap terjaga sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, harkat dan martabat yang melekat pada dirinya harus dijaga tanpa anak tersebut meminta.

Belakangan ini, kasus anak yang berhadapan dengan hukum sudah melekat di kalangan masyarakat umum, lebih-lebih pada kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Seperti halnya yang terjadi di daerah Cisauk, Tangerang, dimana dua anak dibawah umur menjadi geng spesialis pencurian sepeda motor. Seorang di antaranya ditembak polisi karena melawan saat hendak ditangkap. ¹³

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *Over Capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masivnya jumlah tahanan narapidana, lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malahan fungsi lapas

-

¹² Ridwan Mansyur, "*Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*", dalam https://www.mahkamahagung.go.id, "diakses pada" 21 April

¹³ Davit Setyawan, "KPAI: Anak Terlibat Kriminalitas karena Terinspirasi Lingkungan tak Ramah Anak", http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak/, "diakses pada" 1 Juni 2016.

bergeser sebagai *Academy of Crime*, tempat dimana para narapidana lebih diasah kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.¹⁴

Dalam paragraf ketiga pada penjelasan bagian umum UU SPPA, mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak umum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹⁵

Oleh karena itu keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak harus diterapkan secara komprehensif, yang mana lebih menekankan musyawarah untuk mufakat khususnya dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. Hakim tunggal T.M.Limbong menetapkan bahwa penjatuhan vonis kepada terdakwa anak dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun tanpa masa percobaan. Dalam hal ini sudah adanya unsur pemaaf antara pihak pelaku dan korban dalam proses penyidikan, akan

-

¹⁴ Jecky Tengens, "*Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia*", dalam http://www.hukumonline.com, "diakses pada" 21 April 2016.

¹⁵ Lihat Penjelasan Bagian Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

tetapi belum terikat secara tertulis dan pihak korban meminta kepada hakim untuk melanjutkan proses hukum yang berlaku, dengan alasan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. ¹⁶

Adanya unsur pemaaf bukan berarti terdakwa secara langsung terbebas dari tuntutan pidana yang berlaku. Dalam pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb, Hakim memandang bahwa terdakwa anak mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 193, 197 KUHAP Jo. Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus tersebut di atas dengan menggunakan "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dipahami bahwa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

¹⁶ Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

- 1. Hak anak dalam kesejahteraan keberlangsungan hidup.
- 2. Batas usia pertanggungjawaban Pidana Anak.
- Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum
- 4. Unsur-unsur tindak pidana pencurian
- Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.
- Analisis yuridis pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

C. Rumusan Masalah

Terkait pemaparan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa inti dari pembahasan masalah sudah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb?

2. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penulis. Sejauh penelusuran, penulis menemukan tiga skripsi yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut verifikasi skripsinya:

Suwandi¹⁷, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak* (Studi Kasus Putusan Nomor. 09/Pid.Sus/2014/PN.Jnp), bahwa pada skripsi tersebut penulis hanya menguraikan tentang tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan oleh anak di bawah umur karena melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yaitu pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

Selvia Renida¹⁸, *Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Oleh Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi

.

¹⁷ Suwandi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:09/Pid.Sus/2014/PN.Jnp)*, (Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2015)

¹⁸ Selvia Renida, *Praktik Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor* (CURANMOR) Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem *Peradilan Pidana Anak* (Studi Kasus di Polsek Tanjung Karang Barat), (Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2015)

Kasus di Polsek Tanjung Karang Barat), bahwa pada skripsi tersebut penulis hanya menguraikan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

Dari pemaparan terkait pemabahasan skripsi di atas yang mana variabelnya hampir sama dengan penulis, dalam hal ini penulis belum menemukan pembahasan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb, yang mana pencurian kendaraan bermotor dalam KUHP dikategorikan dalam pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan karena melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian ini untuk menjawab pokok penelitian yang sudah diajukan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

 Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

F. Kegunaan Hasil Penilitian

Berkaitan dengan judul di atas, maka inti pembahasan penelitian mempunyai dua jenis aspek kegunaan, diantaranya:

1. Kegunaan keilmuan (teoritis)

Sebagai upaya bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat memperluas wawasan dan wacana dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Kegunaan terapan (praktis)

Sebagai argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum demi terwujudnya keadilan yang kondusif, terutama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dalam pandangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memberikan batasan-batasan tentang pengertian atas variabel-variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- Yuridis: menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini adalah terkait analisis dengan menggunakan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan KUHAP serta Hukum Islam.
- 2. Pencurian kendaraan bermotor, yakni tindakan mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya tanpa sspengetahuan orang lain. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 362 KUHP yang dimaksud pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah. Sedangkan kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya. Kendaraan bermotor di sini, berjenis sepeda motor yang beroda dua dengan digerakkan oleh sebuah mesin.
- 3. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²² Sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb, bahwa terdakwa masih berusia 17 tahun. Dalam hal ini, batas usia terdakwa masih

¹⁹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipress, 2007), 516.

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 128.

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 478.

²² Lihat di Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 212 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dikategorikan anak di bawah umur, yang mana sesuai dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka (*library research*).

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terkait data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi:

- a) Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bale
 Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.
- b) Pertanggungjawaban pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yakni KUHP, KUHAP dan Hukum Islam.

2. Sumber data

Dalam hal ini, sumber data yang diperlukan terdiri dari dua data yakni sumber data primer dan sekunder, meliputi:

a. Sumber primer

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
 Peradilan Pidana Anak.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang diperoleh sebagai pelengkap atau penunjang dari sumber primer, yakni:

- 1) Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja*dan Penanggulangannya.
- 2) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana.
- 3) Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*.
- 4) Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*.
- 5) Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak lansung ditunjukkan pada subjek penelitian, dengan melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang akan diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Nomor Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.
- b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, perundang-undangan, dan jurnal berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.

4. Teknik pengolahan data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemerikasaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh teruatama dari segi kelengakapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan, dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.²³
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh.²⁴ Dalam hal ini berkaitan dengan analisis yuridis terhadap

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1996), 50

²⁴ Ibid...50.

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh.²⁵ Sebagaimana dapat ditarik kesimpulannya dengan menggunakan analisis konsep yuridis.

5. Teknis analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni dengan cara memaparkan mengenai sanksi hukuman yang diputuskan dalam kasus pencurian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, sampai dengan isi putusan.

Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengolah data yang telah dikumpulkan adalah dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang bersifat khusus.²⁶ Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan teori konsep yuridis yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang dilakukannya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami permasalahan dalam skripsi ini secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang

²⁵ Ibid.,.50.

²⁶ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti* (Pekanbaru: UNRI Pers, 2005), 20.

masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk itu sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab I penulis mengemukakan dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II terkait dengan teori konsep yuridis pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

Bab III lebih menekankan pada pembahasan pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

Bab IV penulis akan menguraikan tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb.

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan dari penelitian ini.